

**PELAKSANAAN KODE ETIK NOTARIS DI ORGANISASI IKATAN
NOTARIS INDONESIA KOTA PEKANBARU**

TESIS

Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister

Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



Oleh:

FADILA AMIMI

NIM : 2120122022

Pembimbing:

Prof. Dr. Yulia Mirwati., S.H., C.N., M.H.

Dr. Yasniwati., S.H., M.H.

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

PELAKSANAAN KODE ETIK NOTARIS DI ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KOTA PEKANBARU

(Fadila Amimi, 2120122022, Fakultas Hukum Unand, 2024, 133 Halaman)
(Pembimbing : Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H& Dr. Yasniwati, SH., MH)

ABSTRAK

Kode etik notaris adalah seperangkat aturan moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berlaku untuk semua anggotanya serta orang yang menjabat sebagai notaris, baik dalam menjalankan tugas notaris maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik ini mencakup ketentuan mengenai kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Sebagai organisasi profesi, Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peran penting dalam penegakan kode etik ini. Dewan Kehormatan sebagai organ dalam organisasi ini berwenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik dan memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbaru; dan Bagaimana kendala atau hambatan dan solusinya pada pelaksanaan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris, serta pendekatan normatif yang melihat hukum sebagai pola perilaku masyarakat yang berinteraksi dalam kehidupan sosial. Beberapa pelanggaran kode etik yang sering terjadi meliputi pembuatan akta yang sudah disiapkan oleh pihak lain, penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris, pengiriman minuta akta kepada klien untuk ditandatangani, pemasangan papan nama kantor notaris yang tidak sesuai ketentuan, persaingan tarif yang tidak sehat, serta promosi atau publikasi diri oleh notaris. Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap notaris yang melanggar kode etik mencakup teguran, peringatan, serta pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan organisasi. Namun, sanksi tersebut hanya berpengaruh terhadap status notaris sebagai anggota organisasi, dan tidak memengaruhi jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Kata Kunci: Penegakan, Kode Etik, Sanksi, Notaris



**ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS OF NOTARIES IN THE
ORGANIZATION OF THE INDONESIAN NOTARIES ASSOCIATION IN
PEKANBARU CITY**

(Fadila Amimi, 2120122022, Faculty of Law, University of Andalas, 2024, 133Pages)
(Supervisors: Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H& Dr. Yasniwati, SH., MH)

ABSTRACT

The notary code of ethics is a set of moral rules established by the Indonesian Notary Association (INI) which applies to all its members and people who serve as notaries, both in carrying out notary duties and in everyday life. This code of ethics includes provisions regarding obligations, prohibitions, exceptions, and sanctions that will be imposed on notaries who violate these provisions. As a professional organization, the Indonesian Notary Association (INI) has an important role in enforcing this code of ethics. The Honorary Council as an organ in this organization has the authority to examine violations of the code of ethics and impose sanctions in accordance with its authority. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the code of ethics against notaries who commit violations by the Management of the Indonesian Notary Association of Pekanbaru City; and What are the obstacles or barriers and their solutions to the implementation of the code of ethics against notaries who commit violations by the Management of the Indonesian Notary Association of Pekanbaru City. This study uses a juridical-normative approach, which aims to analyze laws and regulations related to the implementation of ethical code sanctions against violations of office by notaries, as well as a normative approach that views law as a pattern of behavior of people who interact in social life. Some violations of the code of ethics that often occur include making deeds that have been prepared by other parties, signing deeds that are not carried out before a notary, sending minutes of deeds to clients to be signed, installing notary office signs that do not comply with the provisions, unhealthy tariff competition, and self-promotion or publication by notaries. Sanctions imposed by the Honorary Council of the Indonesian Notary Association against notaries who violate the code of ethics include reprimands, warnings, and dismissal or dismissal from membership of the organization. However, these sanctions only affect the notary's status as a member of the organization, and do not affect the notary's position as a public official.

Keywords: Enforcement, Code of Ethics, Sanctions, Notaries



